

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : IV Koto Aur Malintang

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

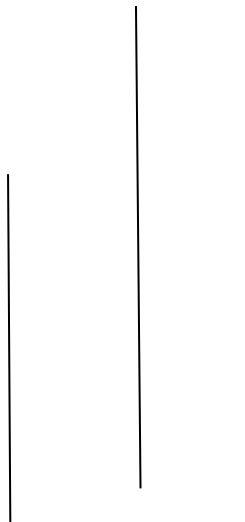
Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG
TAHUN 2026



RENCANA KERJA AWAL (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan kita yang tercinta.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan IV Koto Aua Malintang Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Batu Basa, 19 September 2025

CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG



ALKADRI, S.E., M.M

NIP. 198704082006041003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	15
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB V PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1 1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan



penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

proses penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025.

2. Landasan Hukum

yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2 3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap evaluasi hasil Rencana Kerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada Tahun 2023.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah;

1. sebagai penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2021 – 2026) yang dituangkan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan (RKPD)

2. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas peningkatan Manajemen Sumber Daya Aparatur program/kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja
4. Pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.1 Sistematika Penulisan

3 . Sistimatika Penulisan

Penyajian Renja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

5. evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2024 terhadap capaian Perubahan Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan IV Koto Aua Malintang sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2024 Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan IV Koto Aur Malintang tahun 2024 dan realisasi Renstra Kecamatan IV Koto Aur Malintang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan realisasi APBD.

Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan IV Koto Aur Malintang Tahun 2021-2026 dengan kinerja Tahun 2024 .

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI	%
				Targ et	Realis asi	Satua n			
	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG						705.001.414	652.802.413	92,60
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Doku men	4.000.000	7.000.000	99,96
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2	2	Doku men	2.200.000	2.150.000	97,73



			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	10	Orang/Tahun	314.088.464	252.362.195.	86,33
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	5	Orang/Tahun	33.960.000	31.200.000	90,55

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	35	35	Buah	2.780.000	1.411.600	50,76
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	160	160	Kotak	20.000.000	19.175.000	98,48
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1800	1800	Contoh	116.614.800	116.806.810	94,97S
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3557	3557	Surat	31.026.400	30.985.700	85,04
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Bulan	10.900.000	10.900.000	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	6	Orang	101.409.120	101.409.120	100

	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	Org	37.950.000	20.900.000	81.58
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	0	0	0	0	0	0
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		1 Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	2	2	unit.	546.000	546.000	100
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah Kecamatan	6	6	Usulan	0	0	0
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	6	6	PKK	27.600.000	27.600.000	100
		Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Goro yang dikoordinirkan oleh Kecamatan	12	12	Kali	14.390.000	7.640.000	88.35
III	PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								



	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.992.800	0	0
		Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya fasilitas Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	6	6	PKK	2.992.800	0	0
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi Vertikal terkait	Jumlah pelaksanaan safari ramadhan, MTQ, Pesantren Ramdhan	3	3	Kali	56.240.000	356.240.000	100
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	28	28	UKS	5.280.000	5.280.000	100
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	Tahun	3.000.000	0.00	0.00

Table 2.2
Realisasi program/kegiatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang tahun 2025
(berdasarkan Renstra 2025-2029)

3.1.1.3.1.1.1.1.2.	3.1.1.1.1.1.3.	Realisasi Keuangan			Realisasi Kinerja (Indikator OUTPUT)					
		3.1.1.1.1.1.4.	3.1.1.1.1.1.5.	3.1.1.1.1.1.6.	3.1.1.1.1.1.7.	Target	Realisasi	%		
3.1.1.1.1.1.1.1.2.	3.1.1.1.1.1.3.	3.1.1.1.1.1.4.	3.1.1.1.1.1.5.	3.1.1.1.1.1.6.	3.1.1.1.1.1.7.					
3.1.1.1.1.1.1.1.2.	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	550.000	550.000	3.1.1.1.1.1.6.	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
3.1.1.1.1.1.1.1.2.		B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.640.000	4.640.000	3.1.1.1.1.1.6.	Jumlah dokumen Renstra,TAPKIN,RKA,DPA,RKA-P,DPA-P,RENJA,LAKIP,LPPD dan Laporan Keuangan yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
3.1.1.1.1.1.1.1.2.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.1.1.1.1.1.14.	3.1.1.1.1.1.15.	77.40	Jumlah TPP ASN yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
3.1.1.1.1.1.1.1.2.										



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

		b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.440.000	29.910.000	84.39	Jumlah Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan Bendahara yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
3.1.1	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.1.1.1.1.1.17.	3.1.1.1.1.1.18.	3.1.1.1.1	Jumlah Bimbingan Teknis yang disiapkan untuk ASN	1 Tahun	1 Tahun	-
3.1.1	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	a	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	Jumlah alat kebersihan kantor yg disediakan,	1 Tahun	1 Tahun	100%
		b	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	9.812.000	65.41	jumlah makan minuman tamu dan rapat yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.053.000	69.773.914	87.15	jumlah koordinasi luar daerah yg dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
3.1.1	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.410.500	13.848.115	96.09	Jumlah Alat Tulis Kantor,perangko,materai,benda pos lainnya,cetak dan pengadaan yang disediakan.	1 Tahun	1 Tahun	100%
		b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.900.000	4.420.470	40.55	Jumlah Tagihan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yg disediakan.	1 Tahun	1 Tahun	100%
		c	Penyediaan Jasa Peralatan dan	0.0	0.0	0.0	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	100%

			Perlengkapan Kantor							
		d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.800.000	58.800.000	58.33	Honor 5 orang tenaga swakelola lulusan SMA dan 1 org tenaga swakelola lulusan S1	1 Tahun	1 Tahun	100%
3.1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0.0	Jumlah Pengadaaan AC 2 unit untuk Aula Kantor Camat V Koto Kampung Dalam	1 Tahun	1 Tahun	100%
3.1.1	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.425.000	9.412.500	99.86	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	3 Unit/tahun	3 Unit /Tahun	100%
		b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.0	0.0	0.0	Persentase Jumlah Peralatan Gedung yang disediakan	1 Unit/tahun	1 Unit /Tahun	100%
3.1.1	Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.247.000	2.040.000	90.78	Jumlah UKS yang dapat dibina	13 UKS	13 UKS	100%
3.1.1	Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	0.0	0.0	0.	persentase umlah surat izin atau rekomendasi ,surat keterangan	1400 Surat	1400 Surat	-



	yang Dilimpahkan kepada Camat		terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	tak mampu ,yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima			
3.1.1	Program Koordinasi	A	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.866.500	12.303.500	95.62	Persentase partisipasi Masyarakat pada Musrenbang Kecamatan Jumlah pembinaan organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari, persentase kehadiran masyarakat Gotong Royong	5 Nagari	5 Nagari	100%
3.1.1	Kegiatan Pemberdayaan Desa									

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan
- Adanya komitmen bersama antara Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani;
- Adanya koordinasi yang baik antar pegawai di kecamatan

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal.
- Adanya pembatasan pencairan dana oleh BPKD
- Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di kecamatan akibat banyaknya jabatan Kasi yang tidak terisi.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; Program Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan panduan jangka menengah yang bertujuan untuk mencapai target pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat kecamatan. Target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2026 mencakup berbagai bidang, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setiap target ini memiliki implikasi yang beragam terhadap kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan pembangunan.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2026:

a. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

- **Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM):** Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kecamatan perlu meningkatkan kapasitas SDM, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini mungkin akan mendorong pelaksanaan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan bagi para pegawai kecamatan.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Renstra yang baik akan memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ini bisa mendorong kecamatan untuk lebih terbuka dalam melaporkan hasil program kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
- **Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder:** Target dalam Renstra membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Implikasinya, kecamatan akan meningkatkan upaya koordinasi dengan stakeholder untuk mencapai target capaian program.

b. Implikasi terhadap Pembangunan Infrastruktur

- **Pengembangan Infrastruktur:** Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan aksesibilitas yang lebih baik adalah sebagian dari target Renstra. Implikasinya adalah kebutuhan anggaran yang besar serta pelaksanaan proyek yang tepat waktu untuk memenuhi target capaian.
- **Perencanaan yang Lebih Matang :** Program pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Maka dari itu, kecamatan harus memastikan bahwa rencana

yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- Pemeliharaan dan Pengelolaan : Infrastruktur yang dibangun memerlukan perawatan yang baik agar tetap berfungsi maksimal. Ini menuntut adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan serta pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pelayanan Publik

- Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Target dalam bidang kesehatan dan pendidikan akan mempengaruhi peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan atau pendidikan. Misalnya, kecamatan mungkin perlu merekrut tenaga tambahan atau meningkatkan fasilitas kesehatan dan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan.
- Optimalisasi Teknologi: Renstra yang mencakup target pelayanan publik berbasis teknologi akan mendorong penggunaan teknologi informasi. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan infrastruktur teknologi serta melatih pegawai agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital.
- Pengembangan Sistem Pengaduan: Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kecamatan perlu menyediakan saluran pengaduan yang efektif, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait layanan yang diberikan.

d. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

- Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Target Renstra yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mencakup program pengembangan UKM di kecamatan. Ini akan mendorong kecamatan untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan bagi pelaku usaha.
- Pengurangan Kemiskinan: Program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Kecamatan perlu menjalankan program-program yang efektif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat.

- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Jika Renstra mencakup target untuk memanfaatkan sumber daya alam, implikasinya adalah perlunya pengelolaan yang bijaksana agar tidak merusak lingkungan. Hal ini membutuhkan perencanaan dan regulasi yang memastikan kelestarian lingkungan.

e. Implikasi terhadap Sosial dan Kebudayaan

- Penguatan Kearifan Lokal: Renstra yang menargetkan pelestarian budaya lokal akan mendorong kecamatan untuk mengadakan kegiatan budaya yang dapat memperkuat identitas masyarakat. Implikasinya adalah perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya.
- Pengembangan Partisipasi Masyarakat: Program yang menekankan pada partisipasi masyarakat akan menguatkan rasa kebersamaan dan gotong royong di tingkat kecamatan. Ini bisa berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan kegiatan keagamaan.
- Pencegahan Konflik Sosial: Target capaian yang berorientasi pada kesejahteraan sosial juga memerlukan upaya pencegahan konflik, seperti melalui program mediasi atau pelatihan manajemen konflik. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan tenaga yang kompeten dalam mengelola konflik dan menjaga keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2026 memiliki berbagai implikasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai target tersebut, kecamatan harus melakukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, serta kolaborasi yang efektif dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Dengan begitu, target yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sesuai harapan, dan membawa dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan lintas instansi serta memaksimalkan sumberdaya yang ada;



- b. Perbaikan/perubahan terhadap target capaian dan perubahan / penambahan pagu anggaran terhadap kegiatan prioritas;
- c. Melakukan efisiensi terhadap alokasi belanja operasional kegiatan;
- d. Peningkatan disiplin kinerja aparatur terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan dan peningkatan kapasitas aparatur perencana (SDM) melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan lainnya;
- e. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu baik lingkup internal maupun terhadap perangkat daerah lainnya;

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan IV Koto Aua Malintang dan Pencapaian Renstra
Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)	
1							2	3	4				6	7	8		
7	0	1	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100%	%	100%	100%	100%	100%		
									Nilai	C	Nilai	B	B	BB	BB	BB	
								Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	0	1	0	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	%	85%	%	94%	94%	100%	100%	100%
								Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	%	85%	%	94%	94%	100%	100%	100%	
7	0	1	0	1	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	6 Dok	Dokumen	6 Dok	6 Dok	5 dokumen	5 dokumen	100%
7	0	1	0	1	2	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	4 Laporan	Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

							Dokumen RKA-SKPD									
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	14 orang/14 bulan	Orang / Bulan	14 orang/14 bulan	14 orang/14 bulan	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan		100%
7	01	01	2	02	05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	11 Dokumen	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		100%
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	%	90%	%	90%	90%	100%	100%		100%
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Unit	Paket	1 Unit	1 Unit	20 Paket	20 Paket		100%
	01	01	2	05	03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	20 Paket	Unit	20 Paket	20 Paket	1 Unit	1 Unit		100%
	01	01	2	05	04	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		100%

7	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20 Paket	Paket	20 Paket	20 Paket	4 Paket	4 Paket	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7 Laporan	Paket	7 Laporan	7 Laporan	4 Paket	4 Paket	100%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50 Paket	Dokumen	50 Paket	50 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Dokumen	Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Paket	12 Paket	100%
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6 Paket	Laporan	6 Paket	6 Paket	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20 Laporan	Laporan	20 Laporan	20 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	100%
7	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	%	80%	%	80%	80%	86%	86%	86%
7	0	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit R2	Unit	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	100%
7	0	0	3	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	4 Unit	4 Unit	100%



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

7	0	0	4	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3 unit	Unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%
7	0	0	5	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	0	0	6	1	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	700 arsip	Laporan	700 arsip	700 arsip	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 tagihan/tahun	Laporan	12 tagihan/tahun	12 tagihan/tahun	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15 unit/tahun	Laporan	15 unit/tahun	15 unit/tahun	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Orang/12 bulan	Laporan	4 Orang/12 bulan	4 Orang/12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

7	0 1	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah total nilai aset	Unit	2 unit/tahun	Unit	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	100%
7	0 1	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1Gedung/Tahun	Unit	1Gedung/Tahun	1Gedung/Tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	0 1	0 1	2	0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 buah/tahun	Unit	10 buah/tahun	10 buah/tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	0 1	0 3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 3	2	0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 3	2	0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan	100%	Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100%



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

								Pembangunan di Desa									
7	0	0	2	0	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%		
7	0	0	2	0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%		
7	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	90%	90%	90%		
7	0	0	2	0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%		
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%		

7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

							Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	0	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6 Laporan	Laporan	6 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%
7	0	0	2	0	0	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	15 Dokumen	Dokumen	15 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	0	0	2	0	0	3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		%		%			83%	83%	83%
7	0	0	2	0	0	3	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
7	0	0	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100%	%	100%	100%	90%	90%	90%

7	0	0	2	0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
							Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
							Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tugas Forum Pimpinan Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
							Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
7	0	0	2	0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
7	0	0	2	0	0	Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Anggota Dewan dari Wilayah	%	100%	%	100%	100%	90%	90%	90%

31

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- b). Sasaran :
 - 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan
 - 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
 - 2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani
 - 3. Persentase Pelayanan yang tepat waktu
 - 4. Nilai SAKIP Kecamatan



Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Indikator Kinerja tahun 2024	Indikator Kinerja tahun 2025	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	95%	95%	100 %	100 %	95%	?	96%	100%	
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	95%	BB	BB	A	95%	BB	96%	96%	
3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	95%	100%	100%	100%	95%	90%	100%	100%	
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	BB	BB	A	B	?	BB	BB	

Analisis kinerja pelayanan kecamatan merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan kecamatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1. Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaraan ditingkat kecamatan	%	95	90	95	Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	%	100	80	90	Berhasil
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	3. Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	%	95	90	90	Belum tercapai maksimal
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4. Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	B	B	85	Belum Berhasil dalam pemenuhan nilai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Jkklll
 - 2) Jllll
 - 3) kllll
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai targe ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Kkdkdl
 - 2) Jfkgkkg
 - 3) Nkdld



I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.2.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 95%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 95% yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Meningkatkan

III. Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	95	95	Berhasil
		2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	95	95	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan mencapai 95% Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 95%. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh

aparatur kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

IV. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	B	B	100	Sangat berhasil

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai 100 %, yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara

efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel 2.2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Indiaktor Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	95 %	96%	97%	
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	90 %	96%	97%	



3.	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	90 %	96%	97%	
4.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	90%	96%	97%	
5.	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	95%	96%	97%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan IV Koto Aua Malintang, yaitu:

1 Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, serta dukungan lembaga masyarakat dalam pembangunan, manajemen SDM pemberdayaan masyarakat masih belum tepat;
- Belum optimalnya koordinasi implementasi kebijakan pemerintah dikarenakan belum sinkron dan validnya data & informasi, serta belum lengkapnya SOP dan regulasi.

2. Layanan Publik

- Belum optimalnya kelembagaan dan regulasi kebijakan layanan publik dikarenakan panduan rinci/SOP belum tersedia serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang masih belum optimal;
- Belum optimalnya inovasi pelayanan publik dengan akar permasalahan yang merujuk pada perencanaan dan tata kelola inovasi, monitoring dan evaluasi.

2.4 Reviu terhadap renja perubahan perangkat daerah tahun 2025

Rancangan perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan

dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan Renja perubahan Kecamatan IV Koto Aua Malintang per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100%	271.179.085	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100%	271.179.085	
		Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B		
		Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%				Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	19.120.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	19.120.200	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	15.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	15.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	3.000.000	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	3.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100%	20.070.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100%	20.070.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	2.988.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	2.988.00	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan IV Koto Aua Malintang dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yaitu mulai dari Musrenbang Nagari sampai dengan Musrenbang Kecamatan. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah.

Hasil usulan Musrenbang Kecamatan dan Nagari yang sudah melalui verifikasi Bappeda maupun perangkat daerah yang masuk dalam prioritas 1 (satu), sebagai berikut:

- a. Bidang Fisik, ada 6 yaitu : Masih rendahnya Presentase Jalan dan Jembatan Yang Ditingkatkan, Persentase jalan yang direhabilitasi/ terpelihara, Persentase peningkatan sarana dan prasarana, Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, Belum tercapainya Persentase lahan pertanian terairi irigasi sederhana/desa, Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD, Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.

Untuk status tindak lanjut dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi yaitu telah diverifikasi dan terdaftar, seluruh usulan dibidang fisik telah melalui pemeriksaan kesesuaian lokasi, kebutuhan dan kelayakan teknis oleh tim kecamatan.

Usulan dimasukan dalam prioritas utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung kelancaran kegiatan perekonomian serta pelayanan wilayah.

Usulan tersebut sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait seperti : dinas PUPR sesuai dengan tugas merencanakan, membangun, memelihara dan mengelola jalan, jembatan, irigasi serta bangunan gedung dan fasilitas umum. Di dinas pendidikan sesuai juga dengan fungsi peningkatan mutu, sarana prasarana dan daya saing satuan pendidikan seperti PAUD. Sedangkan di kecamatan sesuai dengan tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memverifikasi usulan serta memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan di kecamatan.

Secara keseluruhan, usulan program dan kegiatan ini sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing perangkat daerah, tidak tumpang tindih dan mendukung pencapaian visi dan misi juga tujuan pembangunan daerah kabupaten padang pariaman.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh KecamatanIV Koto Aua Malintang lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	



No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan		
8	Memperkuat penyelasaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan Kecamatan IV Koto Aua Malintang “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas, Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan. Untuk lebih jelasnya tujuan:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	%	100 %
			Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Nilai	75%
		Nilai Sakip Pemerintah	Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	70,75

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
 - 2.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Kecamatan IV Koto Aua Malintang dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - 1) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.
 - 2) Pelaksanaan Tugas, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 3.3



Tabel 3.3 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG				768.464.885.00				768.464.885.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				768.464.885.00				768.464.885.00
7.01	KECAMATAN				768.464.885.00				768.464.885.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				768.464.885.00				768.464.885.00
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	17.860.000				17.860.000
7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. IV Koto Amal	5 Dokumen	7.000.000	DAU			7.000.000
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan			24.860.000				24.860.000
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. IV Koto Amal	14 Orang/bulan	271.179.085	DAU			271.179.085
7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. IV Koto Amal	1 Laporan	102.496.000	DAU			102.496.000
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.000.000					45.000.000

7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. IV Koto Amal	14 Paket					
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				132.055.000				132.055.000
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. IV Koto Amal	4 Paket	10.960.000	DAU			10.960.000
7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. IV Koto Amal	0 Paket	35.000.000	DAU			35.000.000
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Kec. IV Koto Amal	12 Paket	2.999.000	DAU			2.999.000
7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. IV Koto Amal	12 Laporan	15.600.000	DAU			15.600.000
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. IV Koto Amal	450 Laporan	102.496.000	DAU			102.496.000
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				185.000.000				37.740.000,00
7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. IV Koto Amal	5 Unit	0	DAU			37.740.000,00
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.634.000				132.634.000
7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. IV Koto Amal	12 Laporan	31.834.000	DAU			31.834.000
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	Kec. IV Koto Amal	12 Laporan	25.000.000	DAU			25.000.000
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. IV Koto Amal	12 Laporan	100.800.000	DAU			100.800.000
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.850.000				18.850.000



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. IV Koto Amal	2 Unit	18.850.000	DAU			18.850.000
7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. IV Koto Amal	1 Unit	50.000.000	DAU			50.000.000
7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. IV Koto Amal	5 Unit	40.000.000	DAU			40.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				73.150.200				73.150.200
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.040.000				18.040.000
7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. IV Koto Amal	8 Laporan	8.550.000	DAU			8.550.000
7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. IV Koto Amal	12 Dokumen	9.490.000	DAU			9.490.000
7.01.02.2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				31.240.000				31.240.000
7.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	umlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. IV Koto Amal	4 Dokumen	31.240.000	DAU			31.240.000

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				40.739.000				40.739.000
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				34.065.000,00				34.065.000,00
7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. IV Koto Amal	8 Lembaga Kemasyarakatan	40.739.000	DAU			40.739.000
7.01.03.2.0 1.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. IV Koto Amal	12 Dokumen	0	DAU			0
7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. IV Koto Amal	12 Laporan	25.739.000	DAU			25.739.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.000.000				3.000.000
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.000.000				3.000.000
7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. IV Koto Amal	12 Laporan	3.000.000	DAU			3.000.000
7.01.04.2.0 1.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. IV Koto Amal	12 Laporan	0	DAU			0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.070.000				25.070.000



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				25.070.000				25.070.000
7.01.05.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. IV Koto Amal	80 Orang	20.070.000	DAU			20.070.000
7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. IV Koto Amal	12 Dokumen	3.500.000	DAU			3.500.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				17.687.600				17.687.600
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				17.687.600				17.687.600
7.01.06.2.0 1.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. IV Koto Amal	8 Dokumen	3.043.800	DAU			3.043.800
7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. IV Koto Amal	0 Dokumen	0	DAU			0
7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. IV Koto Amal	6 dokumen	2.988.000	DAU			2.988.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 serta Review Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 - 2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah di Kecamatan IV Koto Aua Malintang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 sebagaimana Tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2026-2030

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Urusan Pemerintah						746.027.933		655.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		600.000.000		
Bidang Urusan Kecamatan																		

[illegible]



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

				Tunjangan ASN		474.023.283	1 Lap	390.575.000	1 Lap	380.040.000	1 Lap	380.040.000	1 Lap	379.840.000	1 Lap	379.840.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat	12 ASN		6 ASN		6 ASN		6 ASN		10 ASN		10 ASN			
				Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji Berkala														
				Jumlah SKP ASN														
				Jumlah ASN Terfasilitasi Pembayaran TPP														
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Peerangan Bangunan Kantor	5 paket		5 paket		5 paket	2.000.00	5 paket		5 paket		5 paket			



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia jasa surat menyurat	12 bln		12 bln	9.310.17 9,70	12 bln	15.000.0 00	12 bln	15.000.0 00	12 bln	15.000.0 00	12 bln	15.000.0 00		
				Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	100.102. 600	12 Bulan	38.400.0 00	12 Bulan	38.400.0 00	12 Bulan	38.400.0 00	12 Bulan	38.400.0 00	12 Bulan	38.400.0 00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyeediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	1 thn	-	1 thn	30.000.0	1 thn	30.000.0	1 thn	30.000.0	1 thn	30.000.0	1 thn	37.000.0		

			Pemerintahan Daerah	jabatan			00		00		00		00		00			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meingkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100%		100%	12.640.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30%		35%		40%		45%		50%		50%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1 thn		1 thn	3.200.000	1 thn	5.000.000	1 thn	5.000.000	1 thn	5.000.000	1 thn	5.000.000		
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 thn		1 thn	9.440.000	1 thn	10.000.000	1 thn	10.000.000	1 thn	10.000.000	1 thn	10.000.000		



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkat nya Kinerja Penyeleng gar aan Tugas Umum Pemerinta n	Meingkatny a Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintah an		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	lapor an	760.000	lapor an	0	lapor an	2.000.00 0	lapor an	2.000.00 0	lapor an	2.000.00 0	lapor an	2.000.00 0	Kecamat an IV Koto Aua Malintan g	

han Kecamata n	Umum																	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Lap	760.000	12 Lap	0	12 Lap	1.000.00 0	12 Lap	1.000.00 0	12 Lap	1.000.00 0	12 Lap	1.000.00 0		
			Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	12 Lap		12 Lap	0	12 Lap	1.000.00 0	12 Lap	1.000.00 0	12 Lap	1.000.00 0	12 Lap	1.000.00 0		
Meningkat nya Kinerja Penyeleng gar aan Tugas Umum Pemerinta han Kecamata	Meingkatny a Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintah an Umum		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang Terselesaikan	100%	3.786.50 0	100%	0	100%	3.800.00 0	100%	3.800.00 0	100%	3.800.00 0	100%	3.800.00 0	Kecamat an IV Koto Aua Malintan g	



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

n																		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Lap	3.786.500	12 Lap	0	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000		
			Sinergotas dengan kepolisian negara republik indoneisa , tentara nasional indonesia dan	Jumlah Sinergotas dengan kepolisian negara republik indoneisa , tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Lap		12 Lap	0	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000		

			instansi vertikal di wilakayah kecamatan															
Meningkat nya Kinerja Penyeleng gar aan Tugas Umum Pemerinta han Kecamata n	Meingkatny a Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintah an Umum		PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	70%	26.756.500	75%	10.200.000	80%	15.000.000	85%	15.000.000	90%	15.000.000	95%	15.000.000	Kecamat an IV Koto Aua Malintan g	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

			penyelenggara an urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Lap	26.756.5 00	12 Lap	10.200.0 00	12 Lap	20.000.0 00	12 Lap	20.000.0 00	12 Lap	20.000.0 00	12 Lap	20.000.0 00		
Meningkat nya Kinerja Penyeleng ga raan Tugas Umum Pemerinta ha n Kecamata n	Meningkatn ya Pelayanan Publik Kewilayahan Berbasis Efektifitas dan Efisiensi		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2,95%	16.712.5 00	3,15%	47.945.0 00	3,45%	80.000.0 00	3,65%	80.000.0 00	3,95%	80.000.0 00	4,25%	80.000.0 00	Kecamat an IV Koto Aua Malintan g	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan														

			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Lap	15.502.500	12 Lap	47.945.000	12 Lap	80.000.000	12 Lap	80.000.000	12 Lap	80.000.000	12 Lap	80.000.000		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	1 lap		1 lap	500.000	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.000		
				Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 lap		1 lap	500.000	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.000	1 lap	1.000.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum														
			Pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Dok	1.000.000	4 Dok	0	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000		



kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG tahun 2026

BAB V PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Batu Basa, 19 September 2025
CAMAT IV KOTO AUR MALINTANG



ALKADRI S.E., M.M
NIP. 198704082006041003

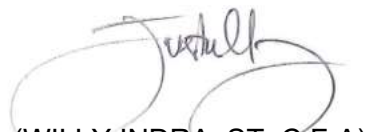
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

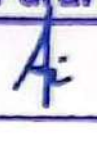
NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	✓
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	